

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Email: blh.labusel@yahoo.co.id

KOTAPINANG - 21464

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, sebagai pedoman utama pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disampaikan terima kasih.

Kotapinang, April 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H.SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19660808 198903 1 007**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.....	14
3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Ranwal Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan satu tahun berjalan. Renja OPD sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rancangan Awal Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan penyusunan rancangan.

Rancangan Awal Rencana kerja (Rancangan Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kerja dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan DLHP dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Renstra DLHP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rancangan Awal Rencana kerja DLHP disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja 2024, Rencana Kerja Anggaran

(RKA) DLHP, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan renja OPD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4868).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Lembaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2024 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi pada tahun 2024 di bidang lingkungan hidup, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sendiri, maupun lebih jauh dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2024, adalah untuk menetapkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama satu tahun melalui sumber pembiayaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN TAHUN 2022

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun lalu dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi DLHP, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran renja DLHP, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada Tahun 2022 sebesar Rp 10.149.690.197,- dan telah terealisasi sebesar Rp 9.188.961.835,- atau sebesar **90,53%** sesuai dengan tabel berikut.

Tabel.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	800.000.000,-	721.994.600,-	90,25 %
2	Belanja	10.149.690.197,-	9.188.961.835,-	90,53 %
3	Surplus/Defisit	9.349.690.197,-	8.446.967.235,-	90,34 %

Realisasi Kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran program dan kegiatan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 pada tabel 2.2. *Evaluasi Renja Tahun 2022*, sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 83,71% yang bermakna baik.

- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 61,91% yang bermakna baik
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 75,89% yang bermakna baik.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dapat dilaksanakan secara penuh sehingga capaian berkategori 87,57% yang bermakna baik.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan maksimal sehingga pencapaian berkategori 47,04% yang bermakna cukup.
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja dari Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 18,41% yang bermakna kurang.
- f. Program Pengelolaan Persampahan
Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Persampahan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 97,41% yang bermakna baik.
- g. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 97,40% yang bermakna baik

h. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 97,14 yang bermakna baik.

i. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja dari Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 94,16% yang bermakna baik.

Berdasarkan hasil evaluasi renja pelaksanaan kegiatan *Lampiran I*, tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan / kendala antara lain adalah:

- Anggaran belanja DLHP yang relatif kecil sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal
- Sarana dan prasarana yang terbatas baik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan

Hidup dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang melakukan koordinasi lintas OPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dimasing-masing bidang.

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan. Kinerja pelayanan DLHP dalam keberhasilan penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan, keterkaitan antar dokumen yakni penjabaran program pada masing-masing dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

Tugas pelayanan yang dilaksanakan DLHP terkait penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lingkungan hidup seperti LAKIP, RENJA, RENSTRA, SLHD serta dokumen terkait dokumen lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 yang mencapai 90,53 persen telah menyelesaikan semua dokumen perencanaan yang dibutuhkan tahun berjalan .

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga lingkungan hidup mempunyai tugas utama membantu kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kewenangannya meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menuangkannya kedalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelaraskan dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan.

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi secara umum untuk mencapai visi dan misi yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke - 6 Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian

pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak.

Isu strategis DLHP berkaitan dengan Misi dan tujuan RPJMD yakni

- terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pengembangan kawasan industri, perkebunan yang dapat mengakibatkan peningkatan polusi udara, air, tanah sehingga mengurangi kualitas kesehatan masyarakat sekitarnya.
- Dampak kebutuhan masyarakat yang meningkat, akibatnya timbunan sampah yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal, pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah masyarakat. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).
- Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan akibatnya potensi bencana timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya perlu peningkatan kompetensi SDM khususnya perencana dan pengawas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan maupun di masing-masing SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun menjabarkan RPJMD, yang menjadi pedoman penyusunan renja SKPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 telah disusun pada Februari 2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD program yang dicantumkan dalam renja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
13. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

**Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Periode Pelaksanaan Tahun 2022**

Sarana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

- 1. RFPD yang akan diinput dalam Renja SKPD
- 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 03.23 (N)
- 3. Indeks Kualitas Air 03.13 (N)
- 4. Indeks Kualitas Udara 04.53 (N)
- 5. Persebaran sumber sampah yang terangkut 03.14 (N)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan) (Output)	Target Rencana SKPD Tahun 2022 (Maksimum Rendahnya SKPD)		Realisasi Kinerja pada Trimester		Tingkat Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD tahun 2022 (%)							
				K	Rp	K	Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 04B+10+11	13 = 8 + 12	14 = 13/04B100%	15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
01	2.01	01	01	24.832.398.192	4.841.972.481	339.334.751	1.115.079.176	1.662.418.664	1.356.300.184	3.185.512.149	3.866.312.149	17,96	0,36	17,96	0,36
01	2.02	01	01	17.062.808.716	3.892.329.479	319.470.805	879.048.606	916.336.969	829.432.671	2.897.287.052	2.899.787.052	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.02	01	01	16.707.036.516	3.539.196.992	313.210.806	879.048.606	910.151.450	797.879.621	2.900.068.100	2.900.068.100	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.02	02	02	206.676.140	45.262.497	5.259.800	0	5.179.500	0	42.199.600	42.199.600	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.02	03	03	863.171.000	27.490.000	0	0	0	0	27.490.000	27.490.000	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.03	01	01	1.289.342.352	44.216.349	0	0	0	0	44.216.349	44.216.349	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.05	02	02	713.442.274	35.516.369	0	0	0	0	35.516.369	35.516.369	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.05	11	11	576.900.106	8.708.036	0	0	0	0	8.708.036	8.708.036	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.06	01	01	1.274.961.787	197.659.937	8.801.800	14.318.006	4.896.306	183.849.864	198.736.664	198.736.664	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.06	01	01	33.341.839	4.950.158	814.000	0	1.116.700	2.839.500	4.974.300	4.974.300	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.06	04	04	85.021.429	8.621.171	2.380.000	0	2.343.300	5.079.400	9.910.700	9.910.700	100,00	100,00	100,00	100,00
01	2.09	05	05	65.591.469	7.599.269	808.700	0	1.506.000	4.424.875	6.769.625	6.769.625	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Kode	Uraian	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)											
												Pradikat Kinerja	Pradikat Kinerja																
3	2.01	Pengadaan Perumahan Baru di Wilayah Perbatasan Kota Baru, dan Oasekapal & Lainnya yang dapat Disalurkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	118	Ura	602.800.000	70	Ura	38.178.888	-	37.188.000	37.188.000	90	Ura	37.185.000	37.185.000	50,85	DALIF	5,48	DALIF										
3	2.01	Pengadaan Perumahan Sederhana (Baru) di Wilayah Perbatasan	118	Ura	602.800.000	70	Ura	38.178.888	0	Ura	37.185.000	90	Ura	37.185.000	37.185.000	50,85	DALIF	5,48	DALIF										
4		PROGRAM PEMBELAJARAN PERIKHMAN BIDAYA																											
4	2.04	Pengadaan Fasilitasi Ruang dan Sarana			8.021.350.878			677.468.873			228.180.000			383.174.100	688.079.180					87,49									
4	2.04	Pengadaan Fasilitasi Ruang dan Sarana			8.021.350.878			677.468.873			228.180.000			383.174.100	688.079.180					87,49									
4	2.04	Jumlah Prasarana dan Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten Kota	20	Ura	2.720.540.226	5	Ura	221.202.226	0	Ura	110.100.000	0	Ura	62.102.620	113.206.620	5	Ura	213.206.620	17,24	7,63	DALIF								
4	2.04	Jumlah Prasarana dan Sarana Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten Kota	45	Ura	5.294.801.740	5	Ura	458.258.657	0	Ura	109.954.000	5	Ura	300.051.530	444.681.530	5	Ura	444.031.530	11,11	8,40	DALIF								
5		PROGRAM PERAWASAN SUMBER DAYA LAUTAN DAN PERIKANAN																											
5	2.01	Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Perairan, dan Perikanan lainnya yang dapat Disalurkan dalam Kabupaten Kota			847.900.000			48.482.701			23.976.000			21.546.822	46.822.822						46,82	DALIF							
5	2.01	Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Perairan, dan Perikanan lainnya yang dapat Disalurkan dalam Kabupaten Kota			847.900.000			48.482.701			23.976.000			21.546.822	46.822.822						46,82	DALIF							
5	2.01	Jumlah Dukungan Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten Kota	5	Dokum	847.900.000	1	Dokum	48.482.701	0	Dokum	23.976.000	0	Dokum	21.546.822	46.822.822	1	Dokum	45.822.822	20,09	5,39	DALIF								
5	2.01	Jumlah Dukungan Fisik dan Non Fisik (Baru) Daerah Kabupaten Kota	5	Dokum	847.900.000	1	Dokum	48.482.701	0	Dokum	23.976.000	0	Dokum	21.546.822	46.822.822	1	Dokum	45.822.822	20,09	5,39	DALIF								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program													2.186.711.814	477.207.431	2.136.237.370	43.989.286.130	3.183.901.826											90,88	Bak

Disusun, Januari 2023
 Kotagihang,
KEPALA DIMAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. SYARIFUDDIN, ST., MM
 PEMBINA TK JIV.6
 NIP. 1.966.000.9.189.803.1.007

Faktor pendukung keberhasilan kinerja:
 - Pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan target
 - Faktor pengambat pencapaian kinerja:
 - Kurangnya sarana dan prasarana yang ada
 - Kurangnya sumber daya manusia yang ada
 - Tidak lanjut yang dibelikan dalam tiwulan berikutnya
 - Peningkatan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan target
 - Tidak lanjut yang dibelikan dalam RPKD berikutnya :

BAB III**USULAN PROGRAM, KEGIATANRENCANA KERJA TAHUN 2024****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Penyusunan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi.

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	
	Indonesia Asri dan Lestari	Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN) 2005-2025	Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan

			kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024		<p>1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (f) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (g) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di</p>

			<p>lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu</p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.</p> <p>4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA & LH.</p>
--	--	--	--

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan Draft Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Meningkatkan Pengelolaan Sampah.

3.2.2. Sasaran

Berdasarkan Draft Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatnya Tutupan Lahan
3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, melalui kegiatan tahun 2024.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun 2024. Tabel 3.3 Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kecompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN						9.428.142.680					11.718.054.543		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.980.650.636					11.225.813.295		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						8.980.650.636					11.225.813.295		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.551.897.272					5.689.871.590		
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaskannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-					-		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen		-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD			-	1 Dokumen	DLH
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan		-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD			-	1 Laporan	DLH
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.683.365.065					4.604.206.331		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang	26 Orang/26 Orang		3.630.204.300	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD			4.537.755.375	26 Orang	DLH
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		1 Dokumen	1 Dokumen		38.760.765	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD			48.450.956	1 Dokumen	DLH
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		14.400.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD			18.000.000	1 Dokumen	DLH

2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	-	DLH
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	-	DLH
2	11	01	2.05		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah					19.200.429					24.000.536	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.200.429	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	ASN Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	24.000.536	DLH
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	Luar Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	PNS Dinas Lingkungan Hidup	10 Orang	-	DLH
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					123.350.735					154.188.419	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.942.045	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	6.177.556	DLH
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.817.543	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	12.271.929	DLH
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.986.875	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	9.983.594	DLH
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	-	DLH
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100.604.272	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	30 Laporan	125.755.340	DLH
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.633.567					27.041.959	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	5 Unit	-	DLH
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	21.633.567	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	8 Unit	27.041.959	DLH
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					520.400.000					650.500.000	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	-	DLH

2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.800.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	76.000.000	DLH
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	459.600.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	PPDPK Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	574.500.000	DLH
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					183.947.476					229.934.345	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 Unit	11 Unit	11 Unit	166.220.700	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	11 Unit	207.775.875	DLH
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	31 Unit	31 Unit	17.726.776	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	31 Unit	22.158.470	DLH
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	-	DLH
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					5.000.000					6.250.000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					5.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Instansi pemerintah/swasta yang merencanakan pembangunan	1 dokumen	6.250.000	DLH
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Instansi pemerintah/swasta yang merencanakan pembangunan	1 Dokumen	-	DLH
2	11	02	2.02		Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Instansi pemerintah/swasta yang merencanakan pembangunan	1 Dokumen	-	DLH
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					87.678.130					109.597.663	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					87.678.130	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD			109.597.663	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.678.130	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Lingkungan Di Kab. Labuhanbatu Selatan	1 Dokumen	53.347.663	DLH

2	07	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		usaha dan/atau kegiatan	1 Dokumen	56.250.000	DLH
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					242.866.038						303.582.548	
2	11	04	2.01	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					242.866.038						303.582.548	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,1052 Ha	0,1052 Ha	0,1052 Ha	242.866.038	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		Taman RTH	0,1052 Ha	303.582.548	DLH
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					15.000.000						18.750.000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara					15.000.000						18.750.000	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Penemuan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik	Jumlah fasilitas Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		usaha dan/atau kegiatan	1 Dokumen	-	DLH
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3		10 Laporan	10 Laporan	15.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		usaha dan/atau kegiatan	10 Laporan	18.750.000	DLH
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					45.000.000						56.250.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					45.000.000						56.250.000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketertuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayaan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		usaha dan/atau kegiatan	4 Dokumen	12.500.000	DLH

2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Dibertikan	7 Orang	7 Orang	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Pegawai Negeri Sipil DLH	7 Orang	-	DLH
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Laporan 24 Laporan	24 Laporan	35.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	usaha dan/atau kegiatan	24 Laporan	43.750.000	DLH
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24 Dokumen	24 Dokumen	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	usaha dan/atau kegiatan	24 Dokumen	-	DLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				35.000.000					43.750.000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000					43.750.000	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	11 Lembaga	11 Lembaga	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Lembaga/Masyarakat	3 Lembaga	-	DLH
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen	35.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Lembaga/Masyarakat	10 Dokumen	43.750.000	DLH
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	0 orang	0 orang	-	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Lembaga/Masyarakat	50 orang	-	DLH
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.000.000					12.500.000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.000.000					12.500.000	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	7 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	usaha dan/atau kegiatan	15 Dokumen	12.500.000	DLH

2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	usaha dan/atau kegiatan	15 Dokumen	-	DLH
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								4.985.261.495	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								4.985.261.495	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen (Jakstrada)	1 Dokumen (Jakstrada)	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Instansi pemerintah/swasta yang merencanakan pembangunan	1 Dokumen (Jakstrada)	-	DLH
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Lembaga/Masyarakat	2 Laporan	43.750.000	DLH
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14.500 Ton	14.500 Ton	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Lembaga/Masyarakat	14.500 Ton	4.047.596.800	DLH
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Lembaga/Masyarakat	2 Kelompok	25.000.000	DLH
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	10 Dokumen	-	DLH
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	-	DLH
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	13 unit	13 unit	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	15 unit	868.914.695	DLH

2	11	11	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	-	Kab. Labuhanbau Selatan	APBD	usaha dan/atau kegiatan	5 Laporan	-	DLH						
3				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					447.492.044						492.241.248							
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					447.492.044						492.241.248							
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					40.190.370						44.209.407							
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cemanangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					40.190.370						44.209.407							
3	25	03	2.02	Pembinaan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	120 Unit	4 Unit	116 Unit	5 Unit	40.190.370	Kabupaten Labuhanbau Selatan	APBD	Kelompok Masyarakat	5 Unit	44.209.407	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan						
3	25	03	2.02	Pembertayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Disasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kebutuhannya	20 Kelompok Tani	Kelompok Tak Kelompok Tani	7 Kelompok Tani	0	0	Kabupaten Labuhanbau Selatan	APBD	Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Tani	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan						
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					378.688.674						416.557.541							
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					378.688.674						416.557.541							
3	25	04	2.04	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	25.741.180	Kabupaten Labuhanbau Selatan	APBD	Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	28.315.298	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan						
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	2 Unit	5 Unit	3 Unit	177.388.614	Kabupaten Labuhanbau Selatan	APBD	Kelompok Masyarakat	3 Unit	195.127.475	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan					
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	175.558.880	Kabupaten Labuhanbau Selatan	APBD	Kelompok Masyarakat	5 Unit	193.114.768	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan					
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					28.613.000						31.474.300							

3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dihusahkan Dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dihusahkan dalam Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.613.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		√	Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	31.474.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									0							0		
3	25	06	2.02		Penyelesaian dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									0							0		
3	25	06	2.02	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		10 Pelaku Usaha Perikanan	0 Pelaku Usaha Perikanan	5 Pelaku Usaha Perikanan	5 Pelaku Usaha Perikanan	5 Pelaku Usaha Perikanan	0	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		√	Kelompok Masyarakat	5 Pelaku Usaha Perikanan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	


 Mengesahkan, April 2023
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

H. SYARIF UDDIN, ST, MM
 NIP. 196608081989031007

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahunan ini diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024 sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi dalam penetapan anggaran.

Rancangan Rencana Kerja ini akan dapat tercapai, dilaksanakan dengan penuh dedikasi, komitmen dan kerjasama dari sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan dan good governance.

Kotapinang, April 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


H.SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19660808 198903 1 007